

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru merupakan aktor sentral dalam dunia pendidikan, yang tidak hanya berperan sebagai pengajar dalam proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pembimbing dan teladan dalam pembentukan karakter peserta didik. Peran strategis ini menjadikan guru sebagai salah satu kunci utama dalam mencetak generasi bangsa yang berkarakter, berdaya saing, serta mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman. Namun, idealisasi peran guru tersebut akan sulit terwujud apabila jumlah tenaga pendidik tidak sebanding dengan kebutuhan di lapangan.

Isu kekurangan guru menjadi perhatian secara nasional maupun global. UNESCO (2024), menyebutkan bahwa masih diperlukan sekitar 44 juta guru baru agar semua anak dapat memperoleh akses pendidikan dasar dan menengah yang inklusif. Tantangan ini dirasakan terutama oleh negara-negara berkembang yang menghadapi kendala besar dalam hal rekrutmen, pelatihan, serta retensi tenaga pendidik. Fakta ini menegaskan bahwa isu kekurangan guru tidak hanya menyangkut jumlah, tetapi juga berhubungan erat dengan kapasitas manajemen sumber daya manusia pendidikan, khususnya dalam mempersiapkan guru yang kompeten dan berkelanjutan.

Kemudian, jika ditarik pada konteks nasional, kekurangan guru juga menjadi persoalan di berbagai daerah di Indonesia (Inayatun & Wibowo, 2024: 171). Data Kemendikbudristek menunjukkan kebutuhan guru mencapai sekitar 1,3 juta orang, sementara rekrutmen ASN PPPK baru mencukupi separuhnya. Selain itu, sekitar sepertiga guru ASN berada pada usia mendekati pensiun, sehingga potensi defisit guru di masa mendatang semakin besar (BKN, 2024: 18-19).

Kekurangan guru tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor regenerasi akibat gelombang pensiun, tetapi juga diperkuat oleh aspek regulasi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil

Negara (ASN) yang diundangkan pada 31 Oktober 2023 secara tegas melarang instansi pemerintah melakukan rekrutmen tenaga honorer baru. Implikasi kebijakan ini sangat signifikan bagi sektor pendidikan, karena kekosongan guru akibat pensiun atau mutasi tidak lagi dapat diisi melalui mekanisme honorer non-ASN. Akibatnya, pemerintah daerah harus mengandalkan jalur resmi ASN atau PPPK yang memiliki proses administratif lebih panjang, sehingga tekanan terhadap pemenuhan kebutuhan pendidik menjadi semakin mendesak.

Selanjutnya, pada konteks daerah seperti yang terjadi di Kota Bekasi, fenomena kekurangan guru menjadi persoalan serius dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Data Dinas Pendidikan Kota Bekasi pada September 2025 kekurangan guru mencapai sekitar 2.750 orang di jenjang Sekolah Dasar (SD dan SMP). Kondisi kekurangan guru terjadi akibat sejumlah faktor, antara lain moratorium rekrutmen guru dan tenaga kependidikan selama satu dekade, gelombang pensiun guru secara masif, serta pembukaan Unit Sekolah Baru (USB) yang tidak diikuti dengan penambahan tenaga pendidik, baik di sekolah induk maupun sekolah baru.

Dinamika kekurangan guru dipengaruhi oleh adanya pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN dan PPPK. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan,(2025):

Tidak sedikit pula guru yang berhasil diterima sebagai PPPK akhirnya beralih status menjadi tenaga kependidikan, lantaran kualifikasi pendidikan yang dimiliki tidak sejalan dengan mata pelajaran yang diajarkan sebelumnya. Kekurangan guru tersebut berdampak langsung terhadap beban kerja guru yang ada, mutu pembelajaran, serta keberlangsungan layanan pendidikan, terutama di sekolah-sekolah baru yang masih sangat terbatas jumlah pendidiknya.

Data Dinas Pendidikan Kota Bekasi tahun 2025, jumlah rombongan belajar (rombel) di tingkat Sekolah Dasar (SD) mencapai 4.808 kelas dengan total 142.830 siswa. Setiap guru idealnya memenuhi beban kerja minimal 24 jam mengajar per minggu sesuai regulasi. Namun, hasil perhitungan menunjukkan terdapat ketidakseimbangan antara kebutuhan guru dan ketersediaannya. Rincian kebutuhan, ketersediaan, serta kekurangan guru berdasarkan jenis mata pelajaran dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Analisa Penataan dan Pemerataan Guru SD Negeri

No	Jenis Guru	Alokasi Waktu Kurikulum pada kelas						Jml rombel/t ingkat	Jumlah rombel ideal	Jam Tersedia	Keb. Guru		Jumlah Guru	Tahun Pensiun 2025	Plus/Min + (Non PNS)
		I	II	III	IV	V	VI				Hit	Jam sisa			
1	Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti	4	4	4	4	4	4	4808	5101	19,232	715	2,072	672	6	- 49
	Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti										5		5	-	-
	Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti										17		17	1	-
	Pendidikan Agama Katholik dan Budi Pekerti										-		-	-	-
	Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti										-		-	-	-
2	Guru Kelas SD	24	24	24	24	24	24			115,392	4,808	-	4,350	147	- 605
3	Muatan Lokal Bahasa Daerah	2	2	2	2	2	2	4808	5101	9,616	292	2,608	42	2	- 252
4	Seni dan Budaya	4	4	4	4	4	4			19,232	715	2,072	11	-	- 704
5	Bahasa Inggris	2	2	2	2	2	2			9,616	292	2,608	58	3	- 237
6	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	4	4	4	4	4	4			19,232	715	2,072	468	8	- 255
JUMLAH										192,320	7,559	11,432	5,623	167	- 2,102

Sumber : Data Kebutuhan Guru SD Dinas Pendidikan Kota Bekasi 2025

Berdasarkan Tabel 1.1, kebutuhan guru kelas SD mencapai 4.808 orang, sedangkan yang tersedia hanya 4.350 orang. Setelah memperhitungkan 147 guru yang akan pensiun pada tahun 2025, kekurangan guru kelas diproyeksikan menjadi 605 orang. Kekurangan terbesar juga terlihat pada guru muatan lokal bahasa daerah (252 orang) dan guru seni budaya (704 orang). Kekurangan signifikan juga terjadi pada guru bahasa Inggris (255 orang) dan guru PJOK (255 orang). Jika diakumulasi, total kekurangan guru SD di Kota Bekasi mencapai 2.102 orang. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah karena berdampak pada rasio guru-siswa dan kualitas pembelajaran.

Kekurangan guru tidak hanya terjadi pada jenjang SD, tetapi juga pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Bekasi tahun 2025, terdapat 56 SMP dengan total 1330 rombongan belajar dan 54.931 siswa. Setiap guru diwajibkan memenuhi beban kerja minimal 24 jam per minggu. Namun, hasil analisis menunjukkan ketidakseimbangan antara kebutuhan guru dan ketersediaannya di berbagai mata pelajaran. Rincian kebutuhan guru, ketersediaan guru, serta proyeksi kekurangan guru pada tahun 2025 disajikan pada berikut:

Tabel 1. 2 Tabel Analisa Penataan dan Pemerataan Guru SMP

No	Mata Pelajaran	Alokasi waktu Kurikulum pada kelas			Jml rombongan/tingkat	Jumlah rombongan ideal	Tugas Tambahan (Wakasek, Kepala Lab, Kepala Perpus	Tugas Tambahan Lain Ekuivalen	Jam Tersedia	Keb. Guru		Jumlah Guru	Tahun Pensiun 2025	Plus/Min + (Non ASN)
		VII	VIII	IX						Hit	Jam sisa			
1	Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti	3	3	3	1330	27	4	2	4040	145	560	158	7	6
	Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti						0	0	0	4		4	0	0
	Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti						0	0	0	17		17	1	0
	Pendidikan Agama Katholik dan Budi Pekerti						0	0	0	2		2	0	0
	Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti						0	0	0	0		0	0	0
2	Pendidikan Pancasila	3	3	3		27	5	2	4052	147	524	93	4	-58
3	Bahasa Indonesia	6	6	6		27	16	8	8174	319	524	229	9	-99
4	Matematika (Umum)	5	5	5		27	5	0	6712	255	590	189	10	-76
5	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	5	5	5		27	18	0	6868	264	530	228	5	-41
6	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	4	4	4		27	13	0	5478	205	556	199	4	-10
7	Bahasa Inggris	4	4	4		27	20	0	5562	211	496	219	6	2
8	Seni dan Budaya	3	3	3		27	18	18	4208	145	715	44	0	-101
9	Prakarya					27	13	13	158			33	7	26
10	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	3	3	3		27	20	20	4232	145	770	121	5	-29
11	Muatan Lokal Bahasa Daerah	2	2	2		27	2	2	2686	93	454	54	6	-45
12	Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK)	84	90	90		27	3	3	6422	294	6423	142	5	-157
13	Informatika	3	3	3		27	3	3	4028	146	525	80	0	-66
JUMLAH							140	71	62620	2392	12667	1812	69	-648

Sumber : Data Kebutuhan Guru SMP Dinas Pendidikan Kota Bekasi 2025

Berdasarkan data kebutuhan guru tingkat SMP di Kota Bekasi tahun 2024, kekurangan guru pada tingkat SMP adalah 648 orang. Kemudian, tercatat jumlah siswa sebanyak 54.931 orang dengan jumlah guru aktif hanya 1.812 orang. Perhitungan sederhana menunjukkan bahwa satu guru harus menangani rata-rata 30 siswa. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 menegaskan bahwa rasio ideal guru tetap pemegang sertifikat pendidik adalah 1:20, yakni satu guru mengajar maksimal 20 siswa dalam satu kelas. Dengan demikian, kondisi rasio guru di Kota Bekasi saat ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan dari standar ideal.

Selain ketidakseimbangan rasio guru dan siswa, kekurangan guru diperkuat oleh dinamika demografis daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi tahun 2024, sekitar 22,91% penduduk Kota Bekasi merupakan kelompok usia 0–14 tahun, yang menunjukkan bahwa Kota Bekasi memiliki proporsi penduduk usia sekolah yang cukup besar (BPS Kota Bekasi, 2024). Tingginya jumlah penduduk usia anak ini berdampak langsung pada meningkatnya jumlah peserta didik setiap tahun, sehingga kebutuhan terhadap layanan pendidikan dan tenaga pendidik bertambah secara signifikan. Namun, pertumbuhan jumlah siswa tersebut tidak diimbangi dengan ketersediaan guru yang memadai, baik dari sisi jumlah maupun pemerataannya. Ketidakseimbangan antara peningkatan jumlah siswa dan keterbatasan tenaga pendidik inilah yang semakin memperlebar kesenjangan kebutuhan guru pada jenjang SD dan SMP di Kota Bekasi.

Permasalahan kekurangan guru bukan sekadar kesenjangan kuantitatif antara jumlah tenaga pendidik dan kebutuhan sekolah, tetapi juga mencerminkan tantangan dalam manajemen pendidikan. Menurut Fuadi et al., (2024: 39), manajemen pendidikan tidak hanya mengelola proses pembelajaran, melainkan juga memastikan tenaga pendidik dipenuhi, dikembangkan, dan dimanfaatkan secara optimal. Hal ini sejalan dengan

Santika et al., (2025: 98) yang menegaskan bahwa manajemen SDM yang efektif sangat menentukan kualitas organisasi pendidikan, karena guru berperan sebagai pengajar sekaligus pembentuk karakter peserta didik. Keterbatasan jumlah guru akan berdampak pada meningkatnya beban kerja, sehingga guru harus merangkap lebih banyak mata pelajaran atau kelas, yang pada akhirnya menurunkan efektivitas pembelajaran dan kualitas layanan pendidikan. Dengan demikian, kekurangan guru tidak hanya menghambat pencapaian target kurikulum, tetapi juga berpotensi melemahkan upaya sekolah dalam mencetak generasi berkualitas. Di Kota Bekasi, kekurangan guru masih terjadi pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sehingga memerlukan respons strategis dari Dinas Pendidikan sebagai pengelola sistem pendidikan daerah.

Dalam konteks manajemen strategis, David dan David (2020) mendefinisikan strategi sebagai *“the coordinated and integrated set of commitments and actions designed to achieve the objectives of the organization”*. Definisi tersebut menegaskan bahwa strategi tidak hanya berkaitan dengan penetapan kebijakan, tetapi juga mencakup komitmen organisasi, tindakan terintegrasi, serta pencapaian tujuan melalui tahapan analisis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang saling berkelindan. Oleh karena itu, penanganan kekurangan guru perlu dipahami sebagai proses strategis yang utuh, bukan sekadar keputusan teknis jangka pendek.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Dinas Pendidikan Kota Bekasi memanfaatkan program magang mahasiswa dari program studi pendidikan (praktik mahasiswa LPTK) untuk mengisi kekosongan guru sementara. Mahasiswa magang memiliki kompetensi dasar pedagogik dan profesional sehingga berpotensi mendukung proses pembelajaran (Mefia et al., 2024). Pemanfaatan program magang ini menunjukkan adanya strategi adaptif yang dirancang untuk menyesuaikan keterbatasan sumber daya guru dengan kebutuhan layanan pendidikan di sekolah.

Di berbagai daerah, kekurangan guru umumnya diatasi melalui strategi seperti pengangkatan guru kontrak atau mutasi guru antarwilayah. Sementara itu, pemanfaatan program magang mahasiswa sebagai bagian dari strategi institusional pemerintah daerah belum banyak terdokumentasi secara sistematis dalam penelitian empiris, khususnya pada jenjang SD dan SMP. Dalam hal ini, Wali Kota Bekasi menyatakan bahwa pemanfaatan program magang mahasiswa untuk mendukung pemenuhan kebutuhan guru merupakan fenomena yang relatif baru dan hingga saat ini baru diterapkan di Kota Bekasi sebagai langkah strategis pemerintah daerah dalam merespons kekurangan guru. Oleh karena itu, praktik yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi menjadi menarik untuk dikaji karena melibatkan pengelolaan sumber daya manusia pendidikan melalui pendekatan yang relatif jarang diteliti.

Strategi pemanfaatan program magang mahasiswa di Kota Bekasi tidak berdiri sebagai kebijakan tunggal, tetapi merupakan bagian dari rangkaian tindakan organisasi yang saling terintegrasi. Strategi ini mencakup analisis kebutuhan guru dan kondisi sekolah, perencanaan kerja sama dengan LPTK, implementasi program magang di satuan pendidikan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Keberhasilan strategi tersebut sangat ditentukan oleh konsistensi antar-tahapan serta kemampuan Dinas Pendidikan dalam mengoordinasikan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat.

Kompleksitas pelaksanaan strategi ini tercermin dari keterlibatan Dinas Pendidikan, sekolah, LPTK, dan mahasiswa magang, serta tantangan dalam koordinasi, pembagian peran, pengawasan, dan keberlanjutan program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan guru tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah semata, tetapi membutuhkan kolaborasi multipihak antara pemerintah, sekolah, dan perguruan tinggi. Tanpa pengelolaan manajemen strategis yang terintegrasi, program magang berpotensi menjadi solusi sementara yang tidak

berkontribusi secara signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan guru dalam jangka panjang.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis strategi Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam mengatasi kekurangan guru melalui implementasi program magang mahasiswa dengan meninjau keseluruhan tahapan manajemen strategis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam kajian manajemen pendidikan serta menghasilkan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan strategi pemenuhan kebutuhan guru yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

B. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka fokus pada penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi pemenuhan kebutuhan guru jenjang SD dan SMP melalui program magang mahasiswa oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Adapun sub fokus yang akan dikaji terkait:

1. Proses pembelajaran SD dan SMP di Kota Bekasi ketika kekurangan guru.
2. Dasar kebijakan dan pertimbangan strategis Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam memilih program magang mahasiswa sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan guru.
3. Implementasi program magang mahasiswa sebagai strategi alternatif kebutuhan guru.
4. Tantangan yang dihadapi dalam implelementasi program serta merumuskan rekomendasi strategis bagi keberlanjutannya.
5. Pengembangan Model Hipotetik Strategi Implementasi Magang untuk Pemenuhan Guru Berkelanjutan (SIMPUL) sebagai model strategis pemenuhan kebutuhan guru di Kota Bekasi.

C. Pertanyaan Penelitian

Adapun pernyataan penelitian yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi dan proses pembelajaran pada jenjang SD dan SMP ketika terjadi kekurangan guru?
2. Bagaimana proses perumusan kebijakan dan pertimbangan strategis Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam memilih program magang mahasiswa sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan guru?
3. Bagaimana implementasi program magang mahasiswa dalam mendukung pemenuhan kebutuhan guru di SD dan SMP Kota Bekasi?
4. Bagaimana tantangan dan implikasi implementasi program magang mahasiswa terhadap keberlanjutan strategi pemenuhan kebutuhan guru?
5. Bagaimana Model Hipotetik Strategi Implementasi Magang untuk Pemenuhan Guru Berkelanjutan (SIMPUL) yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian sebagai model strategis pemenuhan kebutuhan guru di Kota Bekasi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis proses kondisi dan proses pembelajaran di SD dan SMP Kota Bekasi ketika terjadi kekurangan guru.
2. Menganalisis dasar kebijakan dan pertimbangan strategis yang melandasi pemilihan program magang mahasiswa sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan guru.
3. Menganalisis implementasi program magang mahasiswa sebagai strategi alternatif pemenuhan kebutuhan guru di SD dan SMP Kota Bekasi.
4. Menganalisis tantangan implementasi program magang mahasiswa serta implikasinya terhadap keberlanjutan strategi pemenuhan kebutuhan guru.

5. Merumuskan Model Hipotetik Strategi Implementasi Magang untuk Pemenuhan Guru Berkelanjutan (SIMPUL) berdasarkan hasil temuan penelitian sebagai model strategis pemenuhan kebutuhan guru di Kota Bekasi.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

- a. Memperkaya penerapan teori manajemen strategis menurut David & David (2020), dalam konteks kebijakan pendidikan daerah, khususnya pada pemenuhan kebutuhan guru.
- b. Menambah literatur mengenai strategi pemenuhan kebutuhan guru melalui kolaborasi multi pihak (Dinas Pendidikan–sekolah–universitas), yang selama ini masih terbatas dalam penelitian pendidikan.
- c. Menghasilkan kerangka konseptual mengenai proses perumusan strategi pemenuhan guru melalui program magang mahasiswa, yang dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Memberikan bahan analitis dan rekomendasi strategis untuk memperbaiki proses perencanaan, koordinasi, dan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan program magang sebagai strategi pemenuhan kebutuhan guru.

- b. Bagi Sekolah dan Universitas

Memberikan acuan strategis dalam menyelaraskan implementasi program magang mahasiswa dengan kebutuhan pembelajaran di sekolah serta kebijakan pemenuhan guru di tingkat daerah.

c. Bagi Daerah Lain

Menjadi referensi dalam menyusun strategi alternatif pemenuhan kebutuhan guru melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi.

d. Bagi Peneliti dan Akademisi

Menjadi referensi empiris dan konseptual bagi pengembangan kajian tentang manajemen guru, kebijakan pendidikan daerah, dan strategi kolaboratif dalam pemenuhan kebutuhan guru.

F. Kebaruan Penelitian (*State of the Art*)

1. Analisis Tren Penelitian dan Visualisasi Bibliometrik

Analisis tren penelitian dilakukan menggunakan pendekatan bibliometrik dengan bantuan perangkat lunak *VOSviewer* untuk memetakan perkembangan topik dan keterkaitan tema penelitian terkait teacher shortage. Data bibliometrik diperoleh dari artikel ilmiah yang terindeks pada *Scopus* dan *Google Scholar* dengan rentang publikasi tahun 2020–2025.

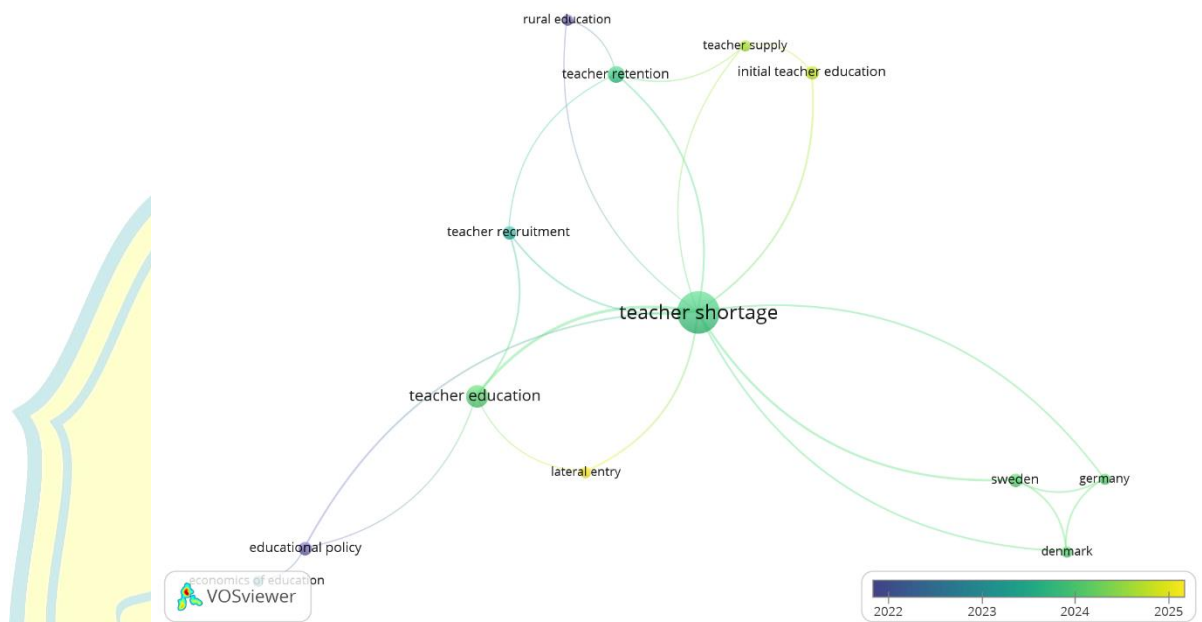
Strategi pencarian dikembangkan secara sistematis menggunakan operator Boolean dan kombinasi kata kunci yang relevan, yaitu:

“teacher shortage” AND (“pre-service teacher” OR “teacher education”) AND (“government policy” OR “local government”). Istilah *pre-service teacher* dalam analisis ini dipahami setara dengan *initial teacher education*, sebagaimana digunakan secara luas dalam literatur internasional.

Seluruh hasil pencarian diekspor ke *Mendeley* dan *Microsoft Excel* untuk proses penyaringan awal, kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan *VOSviewer* guna menghasilkan visualisasi peta keterkaitan kata kunci (*co-occurrence network*), tren waktu (*overlay visualization*), dan kepadatan topik (*density visualization*).

dikaitkan secara langsung dengan strategi kebijakan pemerintah daerah. Tema *educational policy* juga tampak berada pada posisi perifer, yang menunjukkan bahwa kajian kebijakan seringkali berdiri terpisah dari pembahasan implementatif di level daerah.

b. Analisis Tren Waktu Penelitian (*Overlay Visualization*)



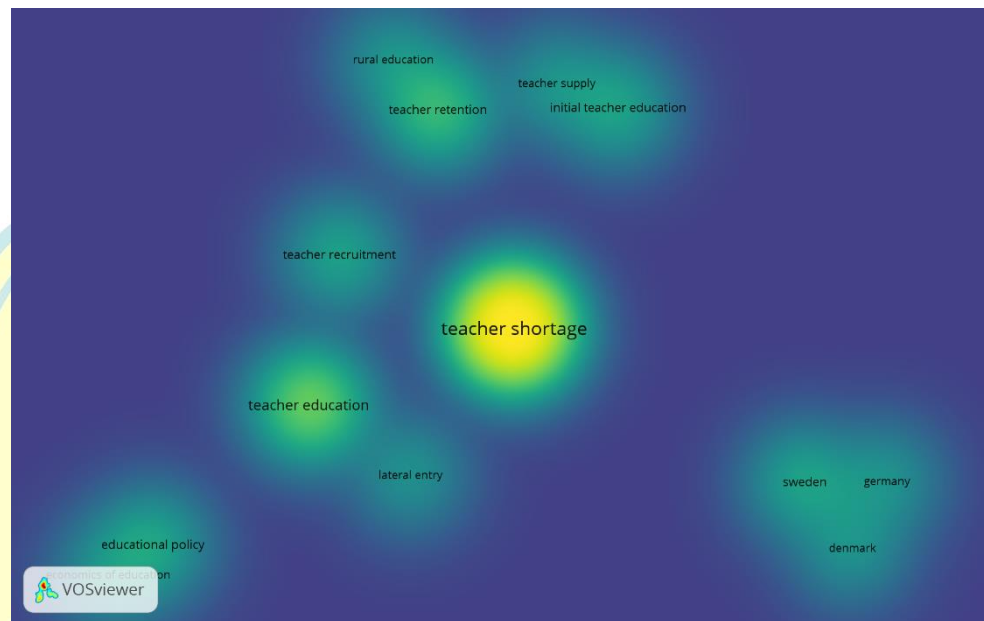
Gambar 1. 2 Analisis Tren Waktu Penelitian

Berdasarkan visualisasi overlay, terlihat bahwa penelitian pada periode 2022–2023 lebih banyak berfokus pada isu *teacher recruitment*, *teacher education*, dan *educational policy*. Sementara itu, pada periode 2024–2025, tren penelitian mulai bergeser ke isu *teacher retention*, *teacher supply*, dan *initial teacher education* sebagai respon terhadap krisis kekurangan guru yang semakin kompleks di berbagai negara.

Meski demikian, belum tampak adanya penguatan tema yang mengaitkan mahasiswa calon guru (*pre-service teacher*) dengan strategi kebijakan adaptif pemerintah daerah sebagai solusi alternatif pemenuhan kebutuhan guru dan masih terbatas pada konteks Negara maju seperti Jerman, Swedia dan Denmark, sedangkan dalam

konteks Indonesia belum ada yang mengkaji. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) pada aspek strategi inovatif berbasis kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan perguruan tinggi.

c. Kepadatan Topik Penelitian (*Density Visualization*)



Gambar 1. 3 Kepadatan Topik Penelitian

Hasil visualisasi kepadatan memperlihatkan bahwa topik *teacher shortage* memiliki intensitas penelitian tertinggi, diikuti oleh *teacher education* dan *teacher recruitment*. Sebaliknya, topik yang berkaitan dengan jalur non-konvensional seperti *lateral entry* dan pemanfaatan mahasiswa pendidikan masih menunjukkan kepadatan yang rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa strategi alternatif dalam pemenuhan kebutuhan guru belum menjadi arus utama dalam kajian akademik.

Berdasarkan analisis tren dan visualisasi bibliometrik tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang kekurangan guru masih didominasi oleh pendekatan struktural dan kebijakan makro. Sementara itu, kajian yang menempatkan program magang mahasiswa (*pre-service teacher*) sebagai bagian dari strategi kebijakan pemerintah daerah masih

sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil posisi untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji secara mendalam perumusan strategi Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam memanfaatkan program magang mahasiswa sebagai solusi adaptif pemenuhan kebutuhan guru.

2. Kebaruan Penelitian

a. Kebaruan Konseptual

Kebaruan konseptual penelitian ini terletak pada pemaknaan ulang program magang mahasiswa bukan sekadar sebagai bagian dari *teacher education* atau *pre-service training*, melainkan sebagai instrumen strategis kebijakan daerah dalam merespons kekurangan guru. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya memosisikan *pre-service teacher* atau *initial teacher education* dalam kerangka pengembangan kompetensi calon guru, sementara penelitian ini menganalisisnya dalam kerangka perumusan strategi organisasi publik sebagaimana dikemukakan oleh David & David (2020). Dengan demikian, program magang diposisikan sebagai bagian dari *strategic response* pemerintah daerah terhadap keterbatasan sumber daya guru.

b. Kebaruan Kontekstual

Secara kontekstual, penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi, yang menghadapi kekurangan guru dalam situasi regulasi ASN yang ketat dan keterbatasan rekrutmen formal. Konteks ini berbeda dari penelitian terdahulu yang umumnya dilakukan pada level nasional atau berfokus pada negara maju. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai strategi pemerintah daerah di Indonesia dalam merespons isu *teacher shortage*. Penelitian yang mengkaji inisiatif strategis pemerintah daerah di Indonesia melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi masih sangat terbatas, sehingga konteks lokal Kota Bekasi memberikan kontribusi empiris yang khas dan relevan.

c. Kebaruan Metodologis

Kebaruan metodologis penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang berfokus pada analisis proses pembelajaran SD dan SMP dalam konteks kekurangan guru serta strategi pemenuhannya melalui program magang mahasiswa. Sebagian besar penelitian tentang kekurangan guru cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif, analisis kebijakan makro, atau studi evaluatif.

Pemilihan studi kasus dipandang tepat karena program magang mahasiswa sebagai strategi pemenuhan kebutuhan guru hanya diterapkan secara spesifik di Kota Bekasi, sehingga memiliki sifat unik (*unique case*) dan kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menganalisis secara mendalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi strategi pemenuhan kebutuhan guru, termasuk dinamika aktor, pengambilan keputusan, serta dampaknya terhadap keberlangsungan proses pembelajaran, yang tidak dapat ditangkap melalui pendekatan survei atau statistik.

d. Kebaruan Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa alternatif strategi non-konvensional dalam pemenuhan kebutuhan guru yang tidak bergantung pada rekrutmen ASN, PPPK, atau tenaga honorer. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah lain dalam merancang strategi kolaboratif dengan perguruan tinggi sebagai solusi adaptif jangka pendek, sekaligus sebagai bagian dari perencanaan sumber daya manusia pendidikan yang lebih berkelanjutan.

3. Relevansi Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian

Berdasarkan peta VOSviewer, penelitian-penelitian terdahulu mayoritas berada pada klaster strategi konvensional pemenuhan guru, seperti rekrutmen tenaga honorer, redistribusi guru, dan percepatan

sertifikasi. Klaster tersebut memiliki kepadatan tinggi dan konektivitas kuat, yang menunjukkan bahwa isu tersebut telah banyak dikaji.

Namun demikian, klaster yang menghubungkan teacher shortage dengan pre-service teacher atau teacher education masih terfragmentasi dan belum terintegrasi secara kuat dengan klaster *government policy* atau *local government strategy*. Hal ini menunjukkan bahwa peran mahasiswa pendidikan sebagai bagian dari strategi kebijakan daerah masih belum menjadi arus utama penelitian.

Dengan demikian, posisi penelitian ini berada pada irisan antara:

- a. Kebijakan pemerintah daerah,
- b. Manajemen sumber daya manusia pendidikan, dan
- c. Pendidikan calon guru (*pre-service teacher*).

Penelitian ini menempati ruang kosong dalam peta penelitian dengan mengkaji perumusan dan implementasi awal strategi Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam memanfaatkan program magang mahasiswa sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan guru, sehingga memberikan kontribusi empiris dan konseptual yang relevan terhadap pengembangan literatur manajemen dan kebijakan pendidikan.